

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan sumber daya manusia khususnya pada pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa di Kabupaten Boalemo adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Boalemo dalam pengembangan sumber daya manusia telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dalam Keputusan Bupati Boalemo dengan adanya anggaran yang disediakan untuk mahasiswa (Putra Daerah) yang kurang mampu akan tetapi dalam pendanaan ini pemerintah hanya menyediakan anggaran yang sesuai dengan sumber pendapatan daerah.
- 2) Faktor-faktor yang menghambat pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Boalemo ini terdapat beberapa faktor yang menghambat pengembangan sumber daya manusia khususnya pada pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa di Kabupaten Boalemo sehingga pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakannya memiliki kendala. Pada anggaran yang tersedia hanya terbatas sehingga menyebabkan tidak semua mahasiswa yang mengajukan proposal mendapatkan bantuan beasiswa, kemudian politik juga bisa menjadi suatu faktor penghambat yakni mahasiswa yang mendapatkan

bantuan tidak tepat sasaran, disebabkan oleh para pelaksana kebijakan yang tidak konsisten seperti yang hanya ada hubungan keluarga atau hubungan emosional lain yang akan mendapatkan bantuan beasiswa. Sehingga orang-orang yang berhak menerima bantuan itu tidak mendapatkan bantuan tersebut, oleh sebab itu dapat menghambat pengembangan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Boalemo.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka yang menjadi saran dari penulis yaitu :

1) Pemerintah Daerah

Bagi pemerintah daerah disarankan dalam melaksanakan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dalam hal pemberian bantuan beasiswa bagi mahasiswa harus tepat pada sasaran. Misalnya mahasiswa yang kurang mampu harus mendapat perhatian utama dari pemerintah daerah.

2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Bagi BPKAD dalam mengelola anggaran bantuan beasiswa harus memiliki peraturan yang menjadi pegangan dalam mekanisme penetapan anggaran bantuan studi.